

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pulau Rempang, yang terletak di Kota Batam, Provinsi Riau, telah ditetapkan sebagai bagian dari wilayah Otorita Batam berdasarkan Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1992. Kota Batam memiliki potensi besar untuk berkembang karena letak geografisnya yang strategis, berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia (Putra, B. M., 2021). Pembangunan Rempang Eco-City di daerah Rempang, Kota Batam, yang dilakukan oleh pemerintah Batam, merupakan salah satu bentuk pemanfaatan strategis sebagai langkah peningkatan kondisi ekonomi wilayah Rempang (Ayuningmas, et al., 2023). Pulau Rempang memiliki luas wilayah 16.583 hektare yang terdiri dari dua Kelurahan, yaitu Rempang Cate dan Sembulang dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 7935 jiwa (BPS Kota Batam, 2022).

Tabel 1. Jumlah Penduduk Pulau Rempang

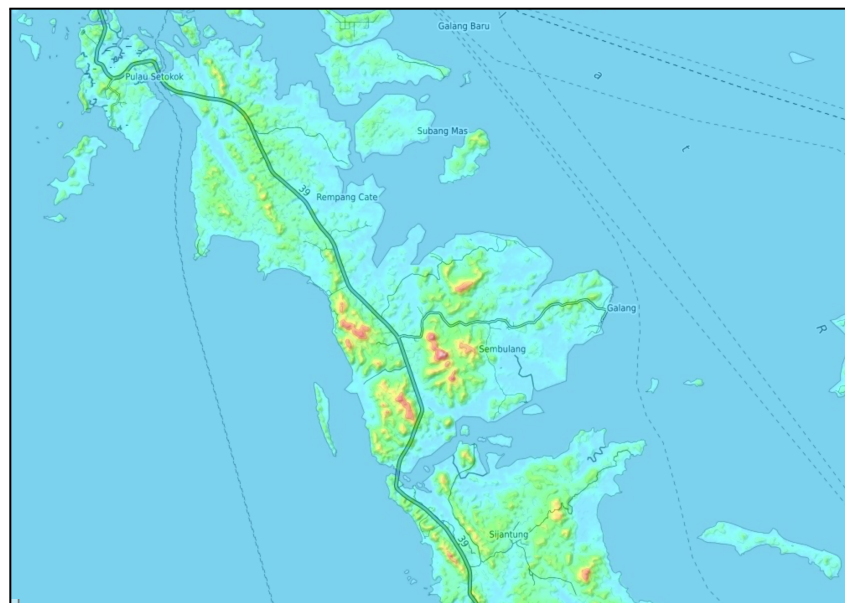
Kecamatan Galang	Jumlah Penduduk	
	2021	2022
Kelurahan Rempang Cate	4096	4388
Kelurahan Sembulang	3417	3547

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batam, 2022

Pulau Rempang di Batam, Kepulauan Riau, tengah menghadapi kompleksitas konflik agraria yang disebabkan oleh sejumlah kebijakan berlapis.

Pada tahun 1992, Keputusan Presiden Nomor 28 menetapkan Rempang sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (Bonded Zone), sementara pada 29 September 1986, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 307/Kpts-II/1986 menyatakan wilayah tersebut sebagai kawasan hutan (Gofita, et al., 2024). Masyarakat adat yang terdiri dari Suku Melayu, Suku Laut, dan beberapa suku lainnya, telah menempati Pulau Rempang selama lebih dari 200 tahun dan menganggap tanah tersebut sebagai milik mereka secara utuh. Kemudian, pada tahun 2001-2002, pemerintah memberikan Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah Batam kepada PT Makmur Elok Graha (Ardhi, S., 2023 diakses dari *ugm.ac.id*).

Gambar 1. Peta Topografi Pulau Rempang



Sumber: *topographic-map.com*, 2024

Tahun 2001, PT Makmur Elok Graha (MEG) diberikan izin untuk mengelola Pulau Rempang oleh Badan Pengusahaan Batam (Gofita, et al., 2024). PT MEG, bagian dari Artha Graha Group yang dimiliki oleh Tommy Winata, awalnya diberi kontrak pengelolaan Pulau Rempang selama 30 tahun, dengan

kemungkinan perpanjangan hingga 80 tahun, serta mencakup Pulau Setokok dan Pulau Galang, masing-masing seluas 300 hektar (Habiba, et al., 2023). Konflik mulai terasa ketika pada tahun 2004 ketika PT MEG melakukan investasi di Pulau Rempang dan melakukan perjanjian dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui *Memorandum of Understanding (MoU)* untuk diberikan lahan seluas 17.000 hektar yang meliputi seluruh Pulau Rempang dan Pulau Subang Mas untuk pengembangan Rempang Eco-City (Valentine, et al., 2023). *MoU* menegaskan bahwa seluruh lahan di Pulau Rempang harus diserahkan kepada pemerintah agar Rempang Eco-City dapat direalisasikan.

Rempang Eco-City merupakan program pembangunan terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi di kawasan Rempang, dengan fokus pada sektor industri, perdagangan, dan pariwisata. program ini diinisiasi oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari program Strategis Nasional 2023 sesuai dengan sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2023 dan dikelola oleh PT Makmur Elok Graha (Chaerudin, M. A. Y. C., 2023). Pembangunan Rempang Eco-City bernilai investasi yang diperkirakan mencapai Rp. 381 Triliun hingga tahun 2080 (Chaerudin, M. A. Y. C., 2023). Investasi yang substansial dan dukungan regulasi yang kuat mendorong program ini untuk meningkatkan daya saing kawasan tersebut sejajar dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Namun, Pulau Rempang menjadi pusat konflik sengketa tanah antara masyarakat lokal Pulau Rempang dan pihak lain yang terlibat dalam pembangunan Eco-City. Masyarakat Rempang telah menghuni pulau ini selama lebih dari dua abad dan menganggap tanahnya sebagai milik

pribadi mereka (Valentine, et al., 2023). Namun, pemerintah dan perusahaan telah memberikan izin atas tanah tersebut, yang memicu konflik sengketa tanah yang kompleks.

Situasi menjadi semakin kompleks ketika investor memulai program Rempang Eco-City pada tahun 2023, yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan industri, perdagangan, dan pariwisata yang terintegrasi. Namun, kerusuhan terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco-City. Penolakan dimulai saat unjuk rasa tanggal 23 Agustus 2023 di Badan Pengusahaan Batam, yang menolak relokasi 16 Kampung Tua, pemukiman warga asli yang terdiri dari suku Orang Laut dan suku Orang Darat yang telah bermukim di Pulau Rempang sejak 1834 (BBC News, 2023). Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dilansir dari *bpbatam.go.id* pada 24 September 2023, mengatakan bahwa pihaknya akan terus bekerja maksimal dalam mewujudkan investasi di Pulau Rempang. Diharapkan pembangunan ini memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kepulauan Batam dan sekitarnya, dengan rencana mengubah wilayah tersebut menjadi Rempang Eco-City yang meliputi sektor industri hijau, jasa, dan pariwisata.

Ombudsman Republik Indonesia menemukan empat pelanggaran maladministrasi pada pelaksanaan program Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City berdasarkan investigasi sejak September 2023 (CNN Indonesia, 2023). Pertama, tidak ada pengakuan sah atas keberadaan Kampung Tua di Pulau Rempang dan tidak optimalnya penetapan batas serta penerbitan sertifikat tanah bagi masyarakat setempat. Kedua, status wilayah dan tanah belum jelas, dengan

sertifikat hak pengelolaan (HPL) masih dalam proses perpanjangan. Ketiga, penetapan Rempang Eco-City sebagai PSN dilakukan terburu-buru tanpa persiapan matang. Keempat, penanganan dampak program oleh aparat menimbulkan rasa takut dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ombudsman Republik Indonesia memberikan tenggat waktu kepada berbagai pihak terkait untuk melakukan tindakan korektif, termasuk Badan Pengusahaan Batam, Tim Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan, Pemerintah Kota Batam, Menteri Agraria dan Tata Ruang, dan Kepolisian Negara RI.

Sebagai upaya penanganan konflik, pemerintah menerbitkan Perpres No. 78 Tahun 2023 pada 8 Desember 2023. Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dilansir dari *bpbatam.go.id* menjelaskan bahwa Perpres ini mengatur tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres No. 62 Tahun 2018. Ketentuan teknis pelaksanaannya menyatakan bahwa penanganan dampak sosial di kawasan perdagangan bebas dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan. Rudi menekankan bahwa meskipun Perpres ini belum menyelesaikan semua persoalan, kehadirannya menjadi dasar penting untuk memberikan kompensasi kepada warga Rempang dan membangun kembali rumah mereka.

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), sebagai salah satu aktor utama, gagal menjalankan perannya secara optimal, terlihat dari berbagai pelanggaran maladministrasi yang ditemukan oleh Ombudsman Republik Indonesia, seperti tidak adanya pengakuan sah atas Kampung Tua, ketidakjelasan status wilayah dan

tanah, serta persiapan program yang dilakukan secara tergesa-gesa tanpa konsultasi publik yang memadai (CNN Indonesia, 2023). Selain itu, penyerahan lahan seluas 17.000 hektar kepada PT Makmur Elok Graha (MEG) tanpa mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat lokal menunjukkan kurangnya keseimbangan antara kepentingan pemerintah, investor, dan hak masyarakat adat yang telah menetap di Pulau Rempang selama lebih dari dua abad (Valentine, et al., 2023). Penanganan konflik yang dilakukan secara represif juga menimbulkan rasa takut dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga semakin memperburuk hubungan antara stakeholder yang seharusnya saling mendukung dalam pembangunan Rempang Eco-City (CNN Indonesia, 2023).

Oleh karena itu, identifikasi respon kesepakatan dan ketidaksepakatan *stakeholder* menunjukkan potensi yang berguna untuk mengetahui serta menyelesaikan isu-isu kontroversial yang tidak bisa dihindari dalam transisi menuju pembangunan yang berkelanjutan (Curry et al., 2013 dalam Tuokuu, 2019). Mengingat keberagaman kepentingan *stakeholder*, praktisi kebijakan perlu melakukan manajemen konflik dan merumuskan strategi konservasi yang mencerminkan beragam kepentingan tersebut. Oleh sebab itu, penting untuk mengidentifikasi *stakeholder* yang relevan yang seharusnya terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait program Rempang Eco-City. Tindakan ini akan memastikan partisipasi yang tepat dan memperkuat keterlibatan stakeholder dalam pengembangan serta pelaksanaan program tersebut (Yamaki, 2017). Pendekatan *stakeholder* berpendapat bahwa pandangan aktor yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak oleh suatu program, seperti pembangunan

berkelanjutan, seharusnya dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan (Freeman, 1984 dalam Tuokuu, 2019). Analisis *stakeholder* penting untuk mengevaluasi dan memahami pemangku kepentingan dari sudut pandang sebuah organisasi, atau untuk menentukan relevansi mereka terhadap sebuah kebijakan (Brugha et al., 2000 dalam Yamaki, 2017). Melalui pengumpulan dan analisis data tentang para *stakeholder* yang terlibat, dapat mengidentifikasi potensial peluang yang relevan dengan keputusan yang diambil dalam konteks tertentu, terutama dalam pengembangan Rempang Eco-City.

Namun, penting untuk diketahui bahwa distribusi kekuasaan yang berbeda di antara *stakeholder* dapat memungkinkan terjadinya pemusatan institusi mengurangi prioritas aktor dengan kekuasaan yang lebih rendah (Utting, 2005 dalam Tuokuu, 2019). Pembangunan kebijakan mengenai isu lingkungan yang efektif membutuhkan pengakuan akan pentingnya kebutuhan *stakeholder*. Persetujuan dalam pandangan *stakeholder* bahwa kebijakan mengenai isu lingkungan perlu responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta memungkinkan terjadinya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengakui ketidakseimbangan kekuatan di antara *stakeholder*, serta menyadari bahwa masyarakat cenderung menjadi korban langsung dari degradasi lingkungan yang tercermin dalam ancaman kehilangan tempat tinggal bagi masyarakat lokal di Pulau Rempang.

Pentingnya pengelolaan *stakeholder* dalam program-program besar seperti ini juga sejalan dengan agenda internasional. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan

sebagai panduan bagi kebijakan publik serta untuk menginspirasi aktor masyarakat dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Inti dari program ini merupakan 17 Sustainable Development Goals (SDGs) dengan 169 target spesifik, sebagian besar di antaranya harus dicapai pada tahun 2030 (Biermann, et al., 2022). Penilaian telah disusun berdasarkan lima dimensi, yang diambil dari ambisi inti yang terdapat dalam dokumen utama Perserikatan Bangsa-Bangsa, Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan: dampak politik SDGs pada (1) tata kelola global, (2) sistem politik domestik, (3) integrasi dan koherensi institusi dan kebijakan, (4) inklusivitas tata kelola dari tingkat lokal hingga global, dan (5) perlindungan integritas ekologis (United Nations General Assembly, 2015).

Permasalahan dalam peran *stakeholder* pada pembangunan Rempang Eco-City terletak pada lemahnya koordinasi, komunikasi, serta pengelolaan dampak sosial yang kurang efektif. Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), sebagai salah satu aktor utama, tidak sepenuhnya menjalankan perannya secara optimal. Hal ini tercermin dari temuan Ombudsman Republik Indonesia terkait berbagai pelanggaran maladministrasi, seperti tidak adanya pengakuan sah terhadap Kampung Tua, ketidakjelasan status wilayah dan tanah, serta proses perencanaan yang tergesa-gesa tanpa melibatkan konsultasi publik yang memadai. Selain itu, keputusan untuk menyerahkan lahan seluas 17.000 hektar kepada PT Makmur Elok Graha (MEG) tanpa mempertimbangkan dampak sosial terhadap masyarakat lokal menunjukkan kurangnya keseimbangan antara kepentingan pemerintah, investor, dan hak masyarakat adat yang telah menghuni Pulau

Rempang selama lebih dari dua abad. Penanganan konflik yang dilakukan secara represif juga memperburuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dan resistensi yang signifikan terhadap proyek ini. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan mengidentifikasi, memetakan dan menganalisis peran *stakeholders* dalam pembangunan Rempang Eco-City, yang diantaranya termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat lokal. Peneliti tertarik untuk menganalisis *stakeholders* dalam pembangunan Rempang Eco-City guna menjawab pertanyaan penelitian bagaimana peran *stakeholders* dalam pembangunan Rempang Eco-City?

1.2. Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, identifikasi masalah untuk penelitian berjudul "Peran *Stakeholders* dalam Pembangunan Rempang Eco-City" diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Ketidakseimbangan kekuatan antara pemerintah pusat, BP Batam, PT MEG, dan masyarakat lokal memengaruhi prioritas dan responsivitas kebijakan lingkungan.
- 2) Minimnya komunikasi efektif dengan masyarakat lokal mengakibatkan resistensi terhadap pembangunan dan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

- 3) Kurangnya pengakuan terhadap Kampung Tua dan kejelasan status tanah menunjukkan ketidakefisienan peran BP Batam dalam mengelola kebijakan terkait hak masyarakat lokal.
- 4) Kompleksitas konflik agraria di Pulau Rempang yang diakibatkan oleh program Rempang Eco-City oleh PT MEG menyebabkan relokasi 16 Kampung Tua dan memicu penolakan dari masyarakat lokal, sebagaimana tercermin dalam MoU antara PT MEG dan BP Batam serta unjuk rasa pada 23 Agustus 2023.
- 5) Ombudsman Republik Indonesia menemukan empat pelanggaran maladministrasi terkait penetapan dan pelaksanaan program Rempang Eco-City.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, perumusan masalah dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Siapa saja *stakeholders* yang terlibat dalam program pembangunan Rempang Eco-City?
- 2) Bagaimana pemetaan *stakeholders* dalam program pembangunan Rempang Eco-City?
- 3) Bagaimana peran *stakeholders* dalam program pembangunan Rempang Eco-City?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengidentifikasi *stakeholders* dalam program pembangunan Rempang Eco-City.
- 2) Untuk melakukan pemetaan *stakeholders* dalam program pembangunan Rempang Eco-City.
- 3) Untuk menganalisis peran *stakeholders* dalam program pembangunan Rempang Eco-City

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini merupakan untuk memperkaya literatur mengenai pemetaan serta peran *stakeholder* dalam program pembangunan besar, khususnya dalam konteks kebijakan lingkungan seperti Rempang Eco-City. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman akademis tentang distribusi kekuasaan dan kepentingan di antara berbagai *stakeholder*, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi kebijakan lingkungan dan sosial. Selain itu, penelitian ini juga dapat berkontribusi dalam ilmu administrasi publik dengan memaparkan wawasan tentang dinamika antar-*stakeholder* dalam implementasi kebijakan publik, serta memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk analisis *stakeholder* dalam kebijakan lingkungan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi berbagai pihak terkait. Bagi pemerintah, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal dan adat setempat, serta mengatasi tumpang tindih regulasi dan konflik kepemilikan tanah. Bagi investor dan pengembang program, penelitian ini membantu dalam memahami pentingnya manajemen *stakeholder* yang efektif untuk mengurangi konflik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Bagi masyarakat lokal, penelitian ini menyediakan informasi dan strategi untuk memperkuat posisi mereka dalam negosiasi dengan pemerintah dan perusahaan, serta meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka terkait pengelolaan dan kepemilikan tanah. Bagi organisasi non-pemerintah dan aktivis, penelitian ini menyediakan data dan analisis yang dapat digunakan untuk advokasi dan kampanye guna melindungi hak-hak masyarakat terdampak oleh program pembangunan.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No .	PENELITI/TAHUN /JURNAL	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
1.	Kismartini, K., Roziqin, A., &	Penelitian ini bertujuan untuk	Landasan teori dalam	Data dikumpulkan	Hasil penelitian menunjukkan

	Authori, N. (2023). A stakeholder analysis for sustainable development of Maritime Village in Semarang coastal community, Indonesia. Public Administration and Policy, 26(3), 321-334.	mengkaji peran pemangku kepentingan dan hubungan mereka yang saling terkait berdasarkan kekuatan dan kepentingan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerah pesisir menggunakan program Desa Maritim di Tambaklorok, Kota Semarang, Indonesia sebagai studi kasus.	penelitian ini merupakan analisis pemangku kepentingan (<i>stakeholder analysis</i>) yang melibatkan identifikasi dan evaluasi peran serta kekuatan serta kepentingan pemangku kepentingan yang terlibat dalam suatu program atau program pembangunan .	n melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan pemangku kepentingan, observasi, serta berita online dan laporan resmi pemerintah, yang kemudian dianalisis secara taksonomis.	empat kategori pemangku kepentingan, yaitu pemain, pengatur konteks, subyek, dan orang banyak. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Semarang, Badan Perencanaan Tata Ruang (DISTARU) Kota Semarang, dan Dinas Perikanan Kota Semarang terbukti menjadi pemain kunci dengan peran dalam kesuksesan program. PT Pelindo (Perusahaan Pelabuhan Indonesia) diidentifikasi sebagai pengatur konteks dengan kepentingan rendah tetapi kekuatan tinggi, bertindak sebagai
--	---	---	--	---	--

					akselerator dalam program pembangunan.
2.	Tuokuu, F. X. D., Idemudia, U., Gruber, J. S., & Kayira, J. (2019). Linking stakeholder perspectives for environmental policy development and implementation in Ghana's gold mining sector: Insights from a Q-methodology study.	Memahami permasalahan seputar kebijakan lingkungan terkait industri pertambangan emas di Ghana, khususnya dalam konteks dampak lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terkait.	konsep kebijakan lingkungan, dampak pertambangan terhadap lingkungan dan hak asasi manusia, serta konflik kebijakan.	Q-metodologi dan analisis faktor Q-sort.	Ketidaksepakatan di antara pemangku kepentingan kunci terkait kebijakan lingkungan dalam industri pertambangan emas di Ghana. Faktor-faktor seperti politik menyalahkan, disjungsi regulasi, dan ketidaksepahaman harapan pemangku kepentingan diidentifikasi sebagai area ketidaksepakatan yang dapat menjelaskan ketidakefektifan pengembangan dan implementasi kebijakan lingkungan.
3.	Yamaki, K. (2017). Applying social network analysis to stakeholder analysis in Japan's natural resource governance: two endangered species conservation activity cases.	mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan dalam tata kelola sumber daya alam Jepang	Konsep pemangku kepentingan (stakeholders), pengelolaan sumber daya alam, dan analisis jaringan sosial (social network	Data diperoleh melalui survei, dan kemudian analisis jaringan sosial dilakukan menggunakan	Dalam kasus Spotted Lady's-Slipper, pemangku kepentingan dari berbagai bidang aktivitas terlibat, dan semua pemangku kepentingan kunci di arena

			analysis).	metode-metode seperti analisis sentralitas, core-periphery, dan faksi.	pengambilan keputusan, sehingga kondisinya lebih baik dalam hal representasi dan inklusivitas pemangku kepentingan yang beragam. Namun, dalam kasus Rebun Lady's-Slipper, beberapa pemangku kepentingan kunci yang bekerja dalam aktivitas di lapangan tidak terlibat, sehingga kondisi representasi dan inklusivitasnya kurang optimal.
4.	Gofita, S., Rasya, H. S., Nabillah, F., Anastasya, N., & Wati, D. S. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Terjadi Pada Kasus Sengketa Agraria di Pulau Rempang.	Menyelidiki konflik yang terjadi di Pulau Rempang antara Pemerintah dan Masyarakat Adat, serta dampaknya terhadap pembangunan Rempang Eco-City.	Konsep tanah adat, konflik hukum, dan hak asasi manusia.	Metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif.	Pulau Rempang merupakan tanah adat yang telah dihuni oleh Masyarakat Adat selama berabad-abad. Konflik terjadi karena hak dan klaim Masyarakat Adat bertabrakan dengan agenda pembangunan Pemerintah, menghasilkan konflik hukum yang kompleks.
5.	Kim, J. S., & Feng,	Penelitian ini	Penelitian ini	Penelitian	Penelitian ini

	Y. (2024). Understanding complex viewpoints in smart sustainable cities: The experience of Suzhou, China. Cities.	bertujuan untuk memahami pandangan kompleks dalam konteks kota cerdas berkelanjutan, dengan menggunakan pengalaman Kota Suzhou, China sebagai studi kasus.	berfokus pada pemahaman pandangan kompleks dalam konteks kota cerdas berkelanjutan. Hal ini didasarkan pada penggunaan Q methodology untuk mengukur perspektif berbeda dan opini subjektif guna mengembangkan gagasan baru dengan menangkap praktik manusia, khususnya dari praktisi kota cerdas di China.	ini menggunakan metodologi Q untuk mengukur perspektif berbeda dan opini subjektif, dengan tujuan mengembangkan gagasan baru dengan menangkap praktik manusia, terutama dari praktisi kota cerdas di China.	membantu praktik perencanaan yang memerlukan proses implementasi ganda untuk mengatasi kompleksitas dan dinamika beragam isu yang terlibat dalam kota cerdas berkelanjutan.
6.	Machado, J. G., Buccini, G., & Recine, E. (2023). An Analysis of key actor networks for scale-up strategies for childhood obesity prevention and the care of children with obesity in Brazil.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jaringan aktor kunci dan pemimpin pendapat (opinion leaders/OLs) dalam upaya penskalaan strategi pencegahan obesitas anak dan	Landasan teori penelitian ini berfokus pada ilmu implementasi (Implementation Science) dengan menggunakan metode Net-Map untuk mengidentifik	Penelitian ini merupakan studi metode campuran yang menerapkan metode Net-Map. Data dikumpulkan melalui lokakarya virtual	Sebanyak 121 aktor kunci federal dan 63 aktor kunci lokal diidentifikasi di seluruh jaringan, di mana 62 dan 28 di antaranya diidentifikasi sebagai OLs, masing-masing. Meskipun domain pemerintah memiliki jumlah

		perawatan anak dengan obesitas di Brasil, terutama di tingkat federal dan daerah (lokal).	asi aktor kunci dan pemimpin pendapat yang memengaruhi penskalaan strategi Brasil untuk mengatasi obesitas anak.	dengan para pemangku kepentingan di tingkat federal dan lokal. Net-Map meliputi pemetaan aktor kunci, pemetaan kekuatan, dan identifikasi pemimpin pendapat. Empat domain kekuatan dianalisis: pemerintah, pendanaan, bantuan teknis, dan penyebaran. Selain itu, dilakukan analisis kualitatif untuk memahami hubungan kekuasaan menurut gigi untuk penskalaan yang sukses.	aktor kunci tertinggi, domain pendanaan memiliki jumlah terendah. Pemerintah eksekutif sektor kesehatan muncul sebagai OL di semua domain kekuatan. Beberapa hambatan termasuk kurangnya koordinasi antara domain kekuatan, kepemimpinan yang hilang di antara aktor kunci, dan kurangnya mekanisme untuk mengelola konflik kepentingan.
7.	Widhiasto, B. K., & Santi, N. A. (2024, March). Analysis of actors and power relationships in forest encroachment study case: Ledang	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktor dan hubungan kekuatan dalam kasus studi	Penelitian ini berfokus pada analisis aktor dan hubungan kekuatan dalam konteks	Metode penelitian ini menggunakan teknik sampel purposif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangku kepentingan yang terlibat dibagi ke dalam

	Village KPH Ropang.	penyerobotan hutan di Desa Ledang, KPH Ropang.	penyerobotan hutan.	berkelompo k dan penentuan responden menggunaka n informan kunci. Analisis data dilakukan melalui: (1) analisis pemetaan pemangku kepentingan, (2) analisis penyerobota n hutan, dan (3) analisis hubungan kekuatan.	tiga kuadran: (1) pemain kunci: kelompok masyarakat hutan, masyarakat, unit pengelolaan hutan Ropang, resor pengelolaan hutan Temutung, (2) subjek: pedagang kayu dan penggergajian, (3) pengatur konteks: pemerintah desa, pemerintah kabupaten, tokoh masyarakat, institusi adat desa, dan pegawai negeri sipil. Faktor-faktor yang menyebabkan penyerobotan hutan meliputi faktor ekonomi, sosial, regulasi, politik, dan budaya. Stakeholder yang memiliki pengaruh besar merupakan masyarakat dan pemerintah desa.
8.	Agu, C., Mbachu, C., Agu, I., Iloabachie, U., &	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis	Landasan teori penelitian ini	Metode penelitian ini	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

	Onwujekwe, O. (2022). An analysis on the roles and involvements of different stakeholders in the provision of adolescent sexual and reproductive health services in Southeast Nigeria.	peran dan keterlibatan pemangku kepentingan yang berbeda dalam penyediaan layanan kesehatan seksual dan reproduksi remaja (ASRH) di Nigeria bagian tenggara, khususnya di Negara Bagian Ebonyi.	mencakup pemahaman tentang bagaimana pemangku kepentingan, terutama institusi pemerintah dan organisasi non-pemerintah, terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan implementasi layanan kesehatan seksual dan reproduksi remaja (ASRH).	merupakan studi kualitatif lintas-seksional yang menggunakan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus untuk mengumpulkan data dari 81 dan 59 pemangku kepentingan dalam ASRH, secara berturut-turut. Sebuah alat pemetaan digunakan untuk analisis pemangku kepentingan.	Kementerian Kesehatan Negara Bagian (MOH) merupakan pemain utama dalam pengembangan kebijakan ASRH dan dikategorikan sebagai 'penyelamat'. Namun, sebagian besar lembaga publik tidak aktif dalam pembuatan kebijakan ASRH. Meskipun demikian, mayoritas institusi publik aktif dalam implementasi program ASRH, terutama di tingkat pemerintah lokal. Diperlukan keterlibatan lebih aktif dari pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepemilikan dan keberlanjutan intervensi ASRH.
9.	Valentine, E., Muhamad, M. N., &	Penelitian ini bertujuan untuk	Penelitian ini menggunakan	Metode penelitian	Penelitian menunjukkan

	Hakim, M. I. N. (2024). Konflik Pulau Rempang Dalam Perspektif Teori Kelas Karl Marx.	menafsirkan konflik di Pulau Rempang dari perspektif Teori Kelas Karl Marx.	Teori Kelas Karl Marx untuk menganalisis konflik di Pulau Rempang.	yang digunakan merupakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari jurnal, surat kabar, dan buku terkait. Metode ini digunakan untuk menyusun dan menganalisis pemahaman yang mendalam tentang konflik di Pulau Rempang dalam hubungannya dengan Teori Kelas Karl Marx.	bahwa konflik di Pulau Rempang memperlihatkan penerapan Teori Kelas dalam konteks dunia nyata. Hal ini menyoroti pentingnya mengakui hukum adat dan tanah adat untuk menemukan solusi konflik antar kelas yang berbeda dalam masyarakat.
10.	Ayuningmas, N. F., Alfian, A., & Ramadani, N. A. (2023). Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Terhadap Rencana Pembangunan	Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap alasan, faktor, dan motif yang menyebabkan penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan Rempang Eco-City di	Penelitian ini mencoba untuk memahami resistensi masyarakat terhadap rencana pembangunan Rempang Eco-City berdasarkan	Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kualitatif dengan sumber data sekunder melalui studi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah membutuhkan persetujuan masyarakat lokal melalui komunikasi yang baik. Namun,

	Rempang Eco-City.	Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau.	adat dan kepentingan lokal.	literatur.	jika komunikasi tidak berjalan lancar, pembangunan masih dilakukan melalui hukum dan aturan negara. Hal ini memicu gerakan sosial masyarakat yang melakukan resistensi terhadap kebijakan dan tindakan yang terjadi.
--	-------------------	--	-----------------------------	------------	--

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

1.5.2. Kajian Teori

1.5.2.1. Administrasi Publik

Administrasi publik, yang dikenal juga sebagai administrasi negara atau administrasi pemerintahan, merujuk pada proses di mana sumber daya dan personil publik diatur dan diselaraskan untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik (Chandler, 1998). Administrasi publik merupakan suatu proses dimana sumber daya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola kebijakan publik (Chandler, 1998). Menurut Starling (dalam Cigler, B. A., 2000), administrasi publik sebagai upaya pemerintah dalam memenuhi janji-janji kebijakan yang diungkapkan selama kampanye pemilihan. Menurut Rosenbloom (2016), menjelaskan administrasi

publik sebagai pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik, dan hukum untuk memenuhi mandat pemerintah dalam berbagai aspek legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang bertujuan untuk mengatur dan melayani masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

Terlebih lagi, konsep "publik" merujuk pada sekelompok individu yang berbagi kesamaan dalam pemikiran, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang mereka anut (Syafi'ie dkk. dalam Pasolong, 2019). Dengan demikian, administrasi publik merupakan proses di mana sumber daya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Keban (2004) juga menguraikan bahwa administrasi publik mencerminkan peran pemerintah sebagai agen utama yang memiliki wewenang atau sebagai regulator yang aktif dan inisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan inisiatif yang dianggap penting atau bermanfaat bagi masyarakat, dengan asumsi bahwa masyarakat merupakan pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk serta menerima regulasi pemerintah.

Paradigma administrasi publik merupakan pandangan atau kerangka berpikir yang mendefinisikan cara administrasi publik dipahami dan diterapkan dalam berbagai konteks, dan ini berkembang seiring waktu dengan penekanan berbeda pada fokus, lokus, dan tujuan yang berbeda dalam administrasi publik (Henry, N., 2017). Paradigma administrasi publik merujuk pada pandangan umum dan kerangka berpikir yang mendefinisikan cara administrasi publik dipahami dan diterapkan dalam berbagai konteks. Nicholas Henry (2017) dapat melakukan

perumusan untuk paradigma administrasi publik berdasarkan focus kepentingannya dan locus dalam institusionalnya untuk dilaksanakan, yaitu:

1. Dikotomi Politik-Administrasi (1900 – 1926)

Dikotomi Politik-Administrasi merupakan perpisahan urusan politik dari urusan administrasi dalam fungsi pokok pemerintah, dimana adanya substansi yang meliputi masalah-masalah politik, pemerintahan, dan kebijaksanaan, dan substansi administrasi pada masalah-masalah organisasi, kepegawaian dan penyusunan anggaran dalam sistem birokrasi pemerintah. Paradigma Dikotomi Politik-Administrasi memengaruhi pentingnya manajemen untuk menyumbangkan analisis ilmiahnya kepada ilmu administrasi, perlunya administrasi publik menjadi ilmu pengetahuan yang bebas-nilai, dan bahwa misi ilmu administrasi merupakan ekonomi dan efisiensi. Locus politik meliputi lembaga legislatif dan yudikatif dengan tugas pokok kenegaraan. Locus administrasi dengan lembaga eksekutif yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan kebijaksanaan negara.

2. Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Dalam Prinsip-Prinsip Administrasi lebih mementingkan fokus dibanding dengan locus. Paradigma ini menganggap bahwa administrasi publik bersifat universal yang dapat diimplementasikan ke seluruh tatanan administrasi tanpa adanya kepedulian mengenai kebudayaan, fungsi lingkungan misi atau kerangka institusi. Paradigma ini juga lebih berfokus pada POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting).

3. Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Dalam paradigma ini mempertemukan kembalinya keberadaan administrasi sebagai ilmu politik dikarenakan administrasi publik pada dasarnya mengabdikan kekuasaan dan memiliki kekuasaan penuh dalam kekuasaan untuk dapat melakukan pengabdian dalam membantu pejabat untuk menguasai pemerintahan secara efisien dan efektif. Lokus dalam paradigma ini menjadi lingkungan birokrasi pemerintahan.

4. Administrasi Publik Sebagai Ilmu Administrasi Publik (1956-1970)

Paradigma ini lebih terpenting kepada fokus dibandingkan lokus, lokus hanyalah bukan suatu persyaratan di dalam paradigma ini. Dengan paradigma ini Teknik – Teknik ilmu manajemen dan teori organisasi lebih ditingkatkan sebagai bagian dari ilmu administrasi publik. Tetapi di dalam paradigma ini tidak berfokus pada tekni-teknik untuk penerapannya pada institusi.

5. Administrasi Publik Sebagai Ilmu Administrasi Publik (1970-1997)

Administrasi ini merupakan pembaharuan, lokusnya tidak terbatas pada bidang administrasi, tetapi mulai berkembang ke arah organisasi. Fokusnya lebih berkembang pada teori administrasi yang mempersoalkan bagaimana seharusnya suatu organisasi berjalan, dapat berperilaku dan keputusan dapat diambil. Dalam paradigma ini administrasi publik lebih berorientasi kepada teori dan Teknik administrasi, manajemen modern, politik – ekonomi, proses pembuatan, analisis, dan metode pengukuran hasil kebijaksanaan publik.

6. Administrasi Publik dikenal sebagai administrasi publik baru atau *governance*

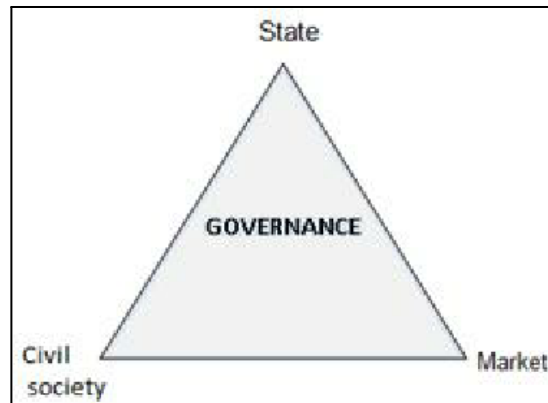
Paradigma ini lebih berfokus kepada usaha yang mengorganisasikan, menggambarkan, mendesain, atau membuat organisasi dapat berjalan ke arah dan dengan mewujudkan nilai – nilai kemanusiaan secara maksimal yang dilaksanakan dengan pengembangan dari sistem desentralisasi dan juga organisasi yang demokratis serta membutuhkan partisipasi masyarakat dan juga memberikan jasa yang merata untuk kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Dalam kriteria sistem pelayanan publik kepada masyarakat jika pelayanan tersebut diterapkan dengan baik akan menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan yang tepat sasaran. Perspektif new public service lebih 30 menghendaki pada peran administrator publik untuk melibatkan masyarakat dalam bertugas dan melayani masyarakat (Karyana, 2014).

1.5.2.2. Governance

Sebagai konsep, *governance* mencakup kapasitas institusional organisasi publik untuk menyediakan barang publik dan lainnya yang diminta oleh warga negara atau perwakilannya secara efektif, transparan, tidak memihak, dan akuntabel, sesuai dengan keterbatasan sumber daya (Katsamunsky, P., 2016). Pierre dan B. Guy Peters (2000, p.14) dalam Katsamunsky, P. (2016) menyatakan bahwa konsep *governance* telah menjadi konsep payung untuk berbagai fenomena seperti jaringan kebijakan, manajemen publik, koordinasi sektor ekonomi, kemitraan publik-swasta, tata kelola perusahaan, dan *good governance* sebagai tujuan reformasi yang dipromosikan oleh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Konsep *governance* menggambarkan kebutuhan akan negosiasi dan

interaksi antara berbagai jenis organisasi dan kelompok dari negara (*state*), swasta (*private*), dan masyarakat sipil (*civil society*) untuk mengatur dengan efisien (Geeraert, A., et al., 2013).

Gambar 2. Governance Triangle



Sumber: Geeraert, A., et al., 2013

State atau negara, baik pada tingkat pusat maupun lokal, tetap memainkan peran penting dalam kebijakan lokal, nasional, dan transnasional (Abbott, K. W., & Snidal, D., 2009). Negara bertanggung jawab untuk menciptakan dan menegakkan hukum serta kebijakan, menyediakan barang publik, dan memastikan kesejahteraan warganya (Geeraert, A., et al., 2013). *Private* atau sektor swasta mencakup perusahaan individu, asosiasi industri, dan kelompok perusahaan lainnya (Abbott, K. W., & Snidal, D., 2009). Aktor-aktor swasta, seperti perusahaan dan organisasi bisnis, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang dulunya hanya menjadi domain negara. *Civil society* atau masyarakat sipil mencakup kelompok-kelompok masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah internasional, peneliti akademis, investor aktivis, dan individu. Konsep masyarakat sipil merujuk pada berbagai organisasi yang idealnya dimulai

dan dikelola oleh aktivitas sukarela warga negara (Dekker, 2001 dalam Geeraert, A., et al., 2013). Organisasi masyarakat sipil, seperti LSM, kelompok advokasi, dan komunitas lokal, memainkan peran penting dalam governance dengan memberikan suara kepada berbagai kepentingan warga negara dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan (Abbott, K. W., & Snidal, D., 2009).

Sinergi dalam *governance* dapat dipecah menjadi dua konsep: komplementaritas (*complementarity*) dan keterlekatan (*embeddedness*) (Evans, P., 1995 dalam Brugha, R., & Varvasovszky, Z., 2000). Komplementaritas merujuk pada pembagian tugas yang jelas antara aktor publik dan swasta, sedangkan keterlekatan menggambarkan hubungan yang melibatkan kolaborasi erat antara warga dan pejabat publik. Keduanya saling mendukung dan penting untuk memahami kompleksitas hubungan sinergis dalam governance yang efektif. *Governance* tidak hanya mencakup pemerintah tetapi juga melibatkan sektor swasta dan masyarakat sipil (Katsamunski, P., 2016). Pemerintah memiliki peran penting dalam koordinasi dan pengaturan, tetapi peran ini terus berkembang dari yang berbasis kekuasaan konstitusional ke arah koordinasi dan penggabungan sumber daya publik dan swasta. Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pengatur tetapi juga sebagai fasilitator dalam menciptakan hasil yang diinginkan melalui kerjasama dengan sektor swasta dan masyarakat sipil. Masyarakat sipil memainkan peran penting dalam governance dengan mendorong akuntabilitas politik, legitimasi, transparansi, dan partisipasi. Model *communitarian governance* menekankan penyelesaian masalah bersama oleh komunitas dengan minim keterlibatan negara, membangun partisipasi positif dan

tanggung jawab kolektif tanpa membentuk birokrasi besar. (J. Pierre, B. Guy Peters, 2000 dalam Katsamunski, P., 2016).

Governance merupakan konsep multidimensi yang melibatkan negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam proses tata kelola yang kolaboratif dan terkoordinasi. Peran negara dalam *governance* terus berkembang, mengutamakan koordinasi dan penggabungan sumber daya untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Dengan demikian, memahami *governance* memerlukan pendekatan yang holistik, mempertimbangkan berbagai aktor dan mekanisme dalam proses tata kelola.

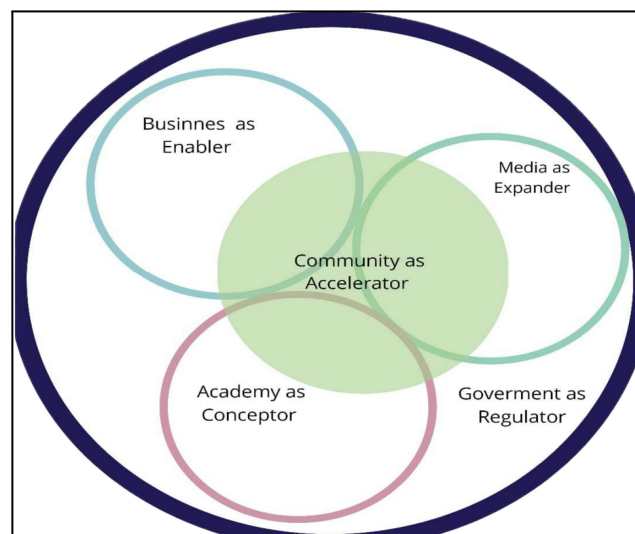
1.5.2.3 Identifikasi *Stakeholders*

Stakeholder memainkan peran penting dalam organisasi baik swasta maupun publik. *Stakeholder* didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi saat tujuan organisasi tercapai (Bashir & Sawhney, 2021). *Stakeholder* memiliki kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan yang memengaruhi keberhasilan organisasi (Tampio et al., 2022). Identifikasi *stakeholder* penting untuk menjaga keberlanjutan dan keseimbangan manfaat lingkungan internal dan eksternal (Jonsson, 2004 dalam Biermann, et al., 2022). Hal tersebut memungkinkan evaluasi dan pemahaman tentang bagaimana karakteristik *stakeholder* memengaruhi proses pengambilan keputusan dan cara mengatasi berbagai jenisnya (Ackermann & Eden, 2011).

Salah satu bentuk kolaborasi *stakeholder* yang efektif merupakan model Pentahelix, yang melibatkan lima elemen utama: *government* (pemerintah), bisnis,

community (komunitas), akademisi, dan media (Lindmark et al., 2009 dalam Permadi et al., 2021). Pada model Pentahelix, kelima pihak saling terkait dan masing-masing memberikan kontribusi terhadap kerangka keseluruhan. Model Pentahelix mengharapkan masing-masing pihak berkontribusi secara maksimal tanpa tumpang tindih tugas, wewenang, atau kewajiban (Soemaryani, 2016). Pendekatan Pentahelix memiliki dasar kerangka yang harmonis untuk transformasi *sustainable city* dengan menekankan partisipasi inklusif dan tanggung jawab bersama di antara para *stakeholders* (Lubica et al., 2019).

Gambar 3. Diagram Model Pentahelix



Sumber: Permadi et al., 2021

Kolaborasi di antara *stakeholders* ini meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program (Muhammad et al., 2023). Pendekatan Pentahelix mendorong keterlibatan *stakeholders* yang komprehensif serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan melalui berbagai perspektif dan resolusi konflik

(Petru et al., 2017). Model Pentahelix dapat mengintegrasikan berbagai *stakeholder* untuk mendorong pembangunan berkelanjutan melalui masukan yang beragam dan solusi kolaboratif. (Heru et al., 2024).

Model Pentahelix mencakup lima pemangku kepentingan utama, yaitu pemerintah, bisnis, komunitas, akademisi, dan media. Masing-masing memainkan peran penting dalam mendorong inovasi dan pembangunan ekonomi, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Government* (Pemerintah): Pemerintah membuat kebijakan dan regulasi yang memastikan kepentingan publik diprioritaskan dalam membentuk lingkungan yang inovatif. Keterlibatan pemerintah memastikan bahwa kepentingan publik dipertimbangkan dalam pengembangan teknologi dan pelayanan publik, sehingga pemerintah sebagai *key stakeholder* (pemangku kepentingan utama) (Klijn, et al., 2012). Peran pemerintah sebagai pemangku kepentingan dalam *sustainable development* memerlukan undang-undang, alokasi sumber daya, dan kerangka partisipatif yang tepat untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan mendorong strategi keberlanjutan yang efektif (Sarabdeen, 2024).
- 2) *Bisnis*: Sektor bisnis merupakan organisasi yang berperan dalam menciptakan nilai ekonomi melalui investasi dalam penelitian dan pengembangan, dengan tujuan menghasilkan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan masyarakat (Riordan & Fairbrass, 2016). Bisnis bertindak sebagai pemangku kepentingan dengan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai pihak, sehingga memerlukan pertimbangan

tanggung jawab dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan dalam pengembangan strategi (Doyle & Poškutė, 2024). Sektor bisnis menjadi bagian yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan inovasi melalui investasi dalam penelitian dan pengembangan.

- 3) *Community* (Masyarakat): Komunitas terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil, termasuk LSM dan kelompok masyarakat, yang berperan aktif dalam mengadvokasi isu-isu sosial dan mewakili kepentingan berbagai segmen masyarakat (Almog-Bar, 2021). Organisasi masyarakat sipil memantau kinerja pemerintah dan melakukan mediasi antara warga negara dan negara untuk memastikan implementasi yang tepat (Schrama & Zhelyazkova, 2018). Partisipasi dari sektor masyarakat memastikan suara yang beragam didengar dan keadilan sosial diprioritaskan.
- 4) Akademisi: Akademisi merupakan institusi dan individu yang menyediakan penelitian berbasis bukti serta publikasi ilmiah untuk menginformasikan kebijakan dan meningkatkan kesadaran sosial, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan pengembangan berkelanjutan (Hafidz & Pentana, 2023) (Daffa et al., 2023). Penelitian dan inovasi disumbangkan oleh akademisi, serta basis pengetahuan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan masyarakat dan mendorong kemajuan teknologi (Klemeš, 2013). Akademisi meningkatkan inisiatif melalui penelitian, pelatihan, dan penyebaran pengetahuan.

- 5) Media: Media sebagai saluran komunikasi penting yang berperan untuk meningkatkan kesadaran publik dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam diskusi mengenai kebijakan dan inovasi (Johannessen et al., 2016). Peran media sangat penting dalam memastikan keberhasilan kolaborasi Pentahelix dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung upaya pengembangan masyarakat secara efektif (Pusparani, P., & Rianto, R., 2021). Media mempromosikan transparansi dan mendorong keterlibatan publik dalam diskusi mengenai kebijakan dan inovasi.

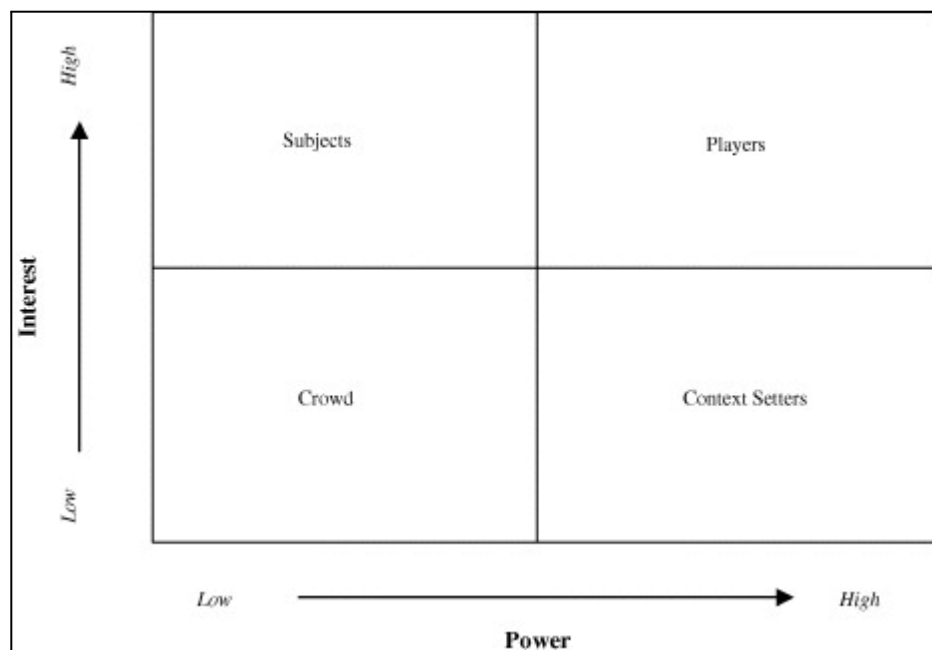
Identifikasi *stakeholders* melalui model Pentahelix merupakan kerangka kolaborasi yang melibatkan lima pemangku kepentingan utama—pemerintah, bisnis, komunitas, akademisi, dan media—yang berperan penting dalam mendorong inovasi, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Masing-masing pihak berkontribusi sesuai dengan peran; pemerintah membuat kebijakan, bisnis menciptakan nilai ekonomi, komunitas mengadvokasi isu sosial, akademisi menyediakan penelitian berbasis bukti, dan media meningkatkan kesadaran serta keterlibatan publik. Kolaborasi yang inklusif ini mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik, transparansi, serta efektivitas program pembangunan yang berkelanjutan melalui partisipasi aktif dari berbagai sektor.

1.5.2.4. Peran Stakeholder

Peran *stakeholder* dapat dikategorikan berdasarkan kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan mereka (Clarkson, 1995 dalam Bryson, 2004). Mereka juga dapat dibagi menjadi pemain kunci, pemangku kepentingan utama, dan pemangku

kepentingan sekunder (Freeman, 1984 dalam Bryson, 2004). Analisis *stakeholder* penting dalam konteks kebijakan pembangunan karena melibatkan mereka dalam proses pembuatan keputusan, menilai keberhasilan program, serta mengantisipasi resistensi dan dampak negatif (Tampio et al., 2022). Pentingnya partisipasi *stakeholder* dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan telah diakui (Roxas et al., 2020). Partisipasi tersebut memastikan responsivitas terhadap kebutuhan dan kepentingan yang beragam dalam masyarakat (Byrd & Gustke, 2011). Keterlibatan *stakeholder* mempromosikan legitimasi demokratis dalam memecahkan masalah sosial (Homer et al., 2022).

Gambar 4. *Power versus Interest Grid*



Sumber: Ackermann and Eden, 1988 dalam Bryson, 2004

Peran *stakeholder* dapat dijelaskan melalui grid kekuasaan versus kepentingan (*power versus interest grids*) yang diuraikan oleh Eden dan Ackermann (1998) dalam Bryson (2004). Grid ini menempatkan stakeholders

pada matriks dua-oleh-dua berdasarkan dua dimensi: kepentingan stakeholders terhadap organisasi atau isu, dan kekuasaan mereka untuk memengaruhi masa depan organisasi atau isu tersebut. Berikut merupakan empat kategori *stakeholders* oleh Eden dan Ackermann (1998):

- 1) *Players* (Pemain): *Stakeholders* yang memiliki kepentingan tinggi dan kekuasaan signifikan. Mereka merupakan aktor utama yang dapat sangat memengaruhi hasil dan keputusan organisasi. Karena kombinasi kekuasaan dan kepentingan mereka yang tinggi, mereka harus dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan.
- 2) *Subjects* (Subjek): *Stakeholders* yang memiliki kepentingan tinggi tetapi kekuasaan rendah. Meskipun mereka sangat peduli dengan hasilnya, mereka tidak memiliki banyak kekuasaan untuk memengaruhi keputusan secara langsung. Namun, pandangan dan dukungan mereka tetap penting karena mereka merupakan bagian dari audiens yang terpengaruh.
- 3) *Context Setters* (Penentu Konteks): *Stakeholders* yang memiliki kekuasaan tinggi tetapi kepentingan langsung yang rendah. Mereka dapat memengaruhi lingkungan dimana organisasi beroperasi, tetapi mungkin tidak memiliki kepentingan pribadi yang kuat terhadap hasil spesifik. Penting untuk memantau mereka karena mereka dapat memengaruhi secara tidak langsung melalui kekuasaan mereka.
- 4) *The Crowd* (Kerumunan): *Stakeholders* yang memiliki kepentingan dan kekuasaan yang rendah. Mereka tidak terlalu tertarik pada isu tersebut dan juga tidak memiliki banyak kekuasaan untuk memengaruhi hasil.

Meskipun mereka bukan prioritas utama, tetap penting untuk menyadari keberadaan mereka dan bagaimana mereka mungkin bereaksi terhadap perubahan yang lebih besar.

Dengan menganalisis dan memahami peran *stakeholder*, organisasi dapat merencanakan strategi manajemen yang efektif dan membangun dukungan untuk perubahan kebijakan (Kismartini et al., 2020). *Stakeholder* yang terlibat dalam komunikasi formal memiliki motivasi, tujuan, dan peran yang beragam (Bashir & Sawhney, 2021). Identifikasi dan pemetaan *stakeholder* merupakan langkah awal dalam memahami dinamika kekuasaan dan kepentingan yang memengaruhi keberhasilan program atau kebijakan (Bryson, 2004). Peran pemangku kepentingan dapat diklasifikasikan ke dalam lima peran berbeda: *policy creator*, *coordinator*, *facilitator*, *implementer*, dan *accelerator* (Orem et al., 2013 dalam Kismartini, et al., 2023). Masing-masing peran memiliki tanggung jawab dan fungsi yang spesifik, sebagai berikut:

- 1) *Policy Creator*: *Policy creator* merupakan instansi yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan berdasarkan pertimbangan politik, sosial, dan ekonomi, serta sering mengintegrasikan wawasan teoritis ke dalam proses pembuatannya (Moyo, 2008). Instansi tersebut menyusun dan mengusulkan kebijakan berdasarkan kebutuhan dan tujuan yang teridentifikasi, melibatkan pemangku kepentingan untuk mengumpulkan perspektif dan membangun konsensus mengenai proposal kebijakan (Lu et al., 2020). Peran *policy creator* sangat penting dalam membentuk kerangka

kerja berbagai program dan inisiatif, sehingga menjadikannya penting dalam proses pembuatan kebijakan.

- 2) *Coordinator*: Koordinator bertindak sebagai penghubung, memfasilitasi kolaborasi antar berbagai sektor dan organisasi yang dapat diimplementasikan melalui proses diskusi (Darcis & Thunus, 2020). Koordinator kebijakan memastikan bahwa berbagai kebijakan diselaraskan dan diterapkan secara efektif di berbagai departemen atau sektor, menjaga koherensi dalam pelaksanaan kebijakan dan memfasilitasi komunikasi antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- 3) *Facilitator*: Fasilitator berperan dalam mendukung proses implementasi kebijakan dengan menyediakan sumber daya dan bimbingan kepada para pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa tindakan yang diambil selaras dengan tujuan kebijakan (Pilz, 2004). Fasilitator menjembatani kesenjangan antara pembuat kebijakan dan masyarakat, memastikan bahwa suara para pemangku kepentingan didengar dalam proses pengembangan kebijakan. Peran ini memupuk kolaborasi dan memastikan bahwa kebijakan relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 4) *Implementer*: *Implementer* berperan sebagai penanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang telah didelegasikan, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan tersebut, dan mengoperasionalkan kerangka kerja yang telah ditetapkan (Chiavegatto et al., 2005). Keterlibatan dan kepuasan *implementer* menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan kebijakan dan

keberhasilan keseluruhan (H., Y., Luchko, 2022). Partisipasi *implementer* dalam kebijakan publik mempengaruhi keputusan dan hasil yang menentukan keberlanjutan kebijakan (Gicovi, et al., 2021)

- 5) *Accelerator*: *Accelerator* berperan dalam mempercepat proses adopsi kebijakan dengan memanfaatkan jaringan dan sumber daya untuk mempercepat implementasi dan respons terhadap isu-isu mendesak. (Lu et al., 2020). Akselerator kebijakan merupakan aktor yang bertujuan mempercepat pengembangan dan implementasi kebijakan melalui pendekatan atau teknologi inovatif, dengan menyediakan sumber daya dan dana untuk mengatasi permasalahan mendesak serta memastikan respons yang tepat waktu terhadap tantangan masyarakat dan percepatan program pembangunan.

Dalam konteks manajemen publik dan nirlaba, analisis *stakeholders* merupakan alat penting untuk berpikir dan bertindak secara strategis dalam menghadapi tantangan dan peluang yang kompleks (Bardach, 1998 dalam Bryson, 2004). Meskipun tidak menjamin penciptaan nilai publik, analisis *stakeholders* menyediakan informasi yang membantu dalam memahami kebutuhan dan kepentingan yang beragam dalam masyarakat (Nutt, 2002). *Stakeholders* memainkan peran krusial dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan dan program. Melalui analisis *stakeholders* yang cermat, organisasi dapat memperoleh wawasan yang diperlukan untuk menciptakan nilai publik dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat secara lebih efektif (Freeman, 1984 dalam Bryson, 2004).

Klasifikasi peran *stakeholder* berdasarkan kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan sangat penting dalam mendukung kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Partisipasi aktif *stakeholder* memastikan bahwa keputusan diambil dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan kepentingan, serta membantu mengantisipasi resistensi atau dampak negatif. Setiap peran *stakeholder* memiliki fungsi penting dalam memfasilitasi kerjasama, mempercepat implementasi, serta menjaga keberlanjutan kebijakan. Pemetaan kekuasaan dan kepentingan *stakeholder* memudahkan organisasi untuk merancang strategi manajemen yang efektif dan mendukung keberhasilan kebijakan.

1.5.2.5. Eco-City

Konsep Eco-City merupakan sebuah konsep yang memberikan kesejahteraan berkelanjutan bagi penduduknya dengan memastikan konsumsi sumber daya terbarukan tidak melebihi kapasitas produksi, limbah tidak melampaui batas asimilasi lingkungan, serta menjaga agar tidak terjadi kerusakan bagi lingkungan sekitar (Moataz et al., 2017). Istilah Eco-City seringkali digunakan dengan istilah seperti *sustainable city* atau *smart city* (Alusi et al., 2011). Eco-City memiliki fokus pada pembangunan berkelanjutan dengan mengurangi penggunaan energi, air, dan makanan, serta meminimalkan limbah dan polusi (Xiaochun et al., 2012). Dalam praktiknya, tata kelola yang efektif menjadi hal krusial dalam Eco-City sehingga memerlukan koordinasi antar sektor serta partisipasi aktif pemangku kepentingan untuk menciptakan praktik berkelanjutan (Simon & Joss, 2015).

Pengembangan Eco-City memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap interaksi kompleks antara bidang lingkungan, ekonomi, politik, dan sosial budaya yang didasari oleh prinsip-prinsip ekologi. Wilayah perkotaan, baik kota besar maupun kecil, harus dirancang secara cermat untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup penduduk, sembari menjaga keberlanjutan ekosistem yang menopang kehidupan masyarakat (San Francisco Eco-City Declaration, 2008 dalam Moataz et al., 2017). Deklarasi San Francisco menekankan bahwa pengembangan Eco-City melibatkan visi bersama, inisiatif masyarakat, tata kelola publik yang efektif, industri yang ramah lingkungan, serta integrasi yang harmonis antara kebutuhan masyarakat, budaya, dan lingkungan yang dibangun (San Francisco Eco-City Declaration, 2008 dalam Moataz et al., 2017).

Stakeholders dalam eco-city mencakup berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat lokal, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, yang dimana setiap aktor berperan penting dalam menawarkan perspektif dan sumber daya yang beragam (Shreema et al., 2024). Pemerintah daerah, pihak swasta, organisasi masyarakat, dan masyarakat lokal menjadi bagian penting yang mendorong inovasi perkotaan serta upaya keberlanjutan lingkungan (Julia et al., 2021). *Stakeholders* juga berperan dalam memfasilitasi kolaborasi, pemberian informasi, serta proses pengambilan keputusan dalam menghadapi kompleksitas dan mendukung pembangunan lingkungan dalam inovasi perkotaan (Kroh, J., & Schultz, C., 2023).

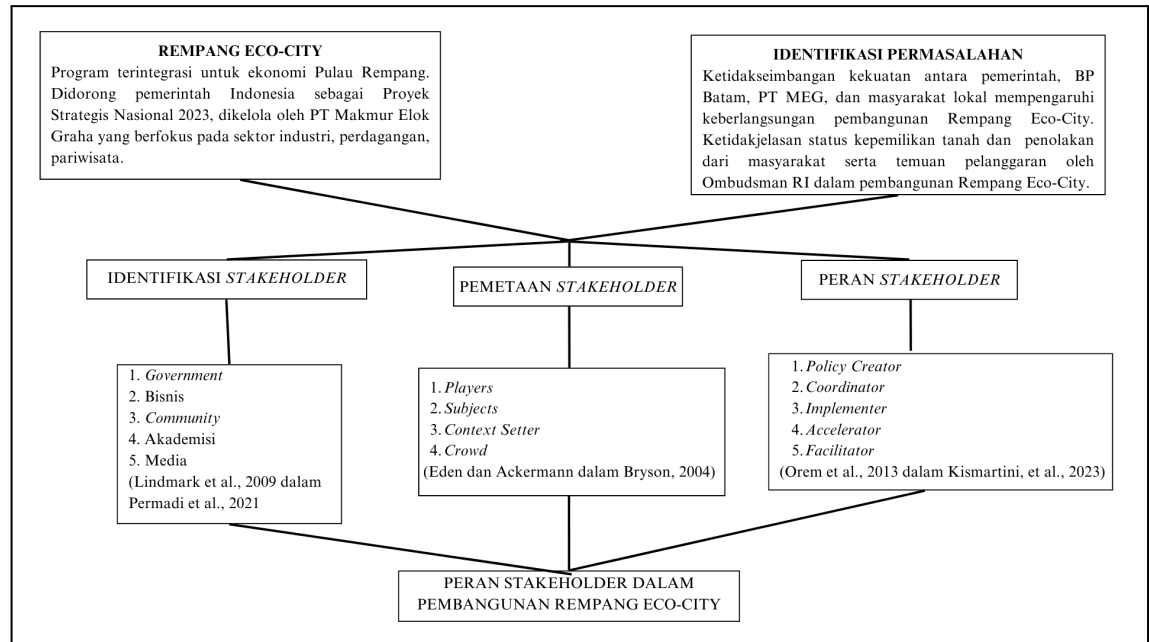
Konsep Eco-City mencerminkan pendekatan dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek lingkungan,

ekonomi, dan sosial. Tujuannya merupakan untuk meningkatkan kualitas hidup di perkotaan dengan mengurangi dampak ekologis melalui perencanaan yang inovatif dan partisipasi masyarakat. Pemangku kepentingan dalam Eco-City melibatkan berbagai individu dan organisasi yang berperan penting dalam mencapai pembangunan kota yang berkelanjutan. Keterlibatan aktif dari para pemangku kepentingan sangat krusial untuk mendorong kolaborasi dan mewujudkan tujuan dari inisiatif kota ramah lingkungan.

1.5.2.6. Kerangka Berpikir

Dalam konteks penelitian ini, kerangka merujuk pada model konseptual yang memetakan bagaimana teori dan konsep yang ada berhubungan dengan unsur-unsur yang diidentifikasi sebagai isu-isu kunci dalam penelitian. Sebagai panduan analisis, kerangka kerja memberikan struktur untuk memahami hubungan antar variabel yang diteliti, menjelaskan bagaimana teori yang relevan dapat diterapkan, dan memberikan arahan untuk mengembangkan hipotesis atau pertanyaan penelitian (Sugiyono, 2010). Kerangka kerja ini memberikan landasan intelektual yang membantu peneliti merancang studi, mengumpulkan data, dan menafsirkan hasil dengan cara yang konsisten dan terinformasi. Kerangka berpikir dari penelitian ini merupakan sebagai berikut:

Tabel 3. Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

Kerangka berpikir dalam penelitian ini membentuk landasan intelektual yang mengarahkan pemahaman dan analisis terhadap isu-isu kunci dalam pembangunan Rempang Eco-City. Dimulai dari permasalahan yang diidentifikasi, yakni ketidakseimbangan kekuatan dan ketidakjelasan status kepemilikan tanah, kerangka berpikir menyoroti konsep *government*, *business*, *community*, *academy*, dan *media* sebagai panduan untuk mengidentifikasi *stakeholders*. Selanjutnya, pemetaan *stakeholders* berdasarkan *power* dan *interest* memungkinkan pemetaan aktor yang memiliki pengaruh signifikan dalam pembangunan yang terdiri dari *players*, *subjects*, *context setters*, dan *crowd*. Klasifikasi peran *stakeholders* membantu memahami kontribusi dan tanggung jawab masing-masing aktor dalam pembangunan Rempang Eco-City dengan kategori seperti *policy creator*, *coordinator*, *facilitator*, *implementer*, dan *accelerator*.

1.6. Operasionalisasi Konsep

Tabel 4. Pembagian *Stakeholders*

Tujuan	Fenomena	Gejala
Identifikasi <i>Stakeholders</i>	<i>Government</i>	Pemerintah pusat dan daerah yang menetapkan kebijakan dan regulasi dalam pembangunan Rempang Eco-City.
	Bisnis	Perusahaan swasta terlibat dalam investasi dan konstruksi infrastruktur dalam pengembangan Rempang Eco-City.
	<i>Community</i>	Organisasi masyarakat sipil maupun LSM aktif yang mengadvokasi partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan Rempang Eco-City.
	Akademisi	Institusi yang berkontribusi pada penelitian dan inovasi dalam pembangunan Rempang Eco-City.
	Media	Platform media dan komunikasi sebagai sarana penyebaran informasi dalam pengembangan Rempang Eco-City.
Pemetaan <i>Stakeholders</i>	<i>Players</i>	<i>Stakeholder</i> yang memiliki kepentingan tinggi dan kekuasaan besar dalam pembangunan Rempang Eco-City.

	<i>Subjects</i>	<i>Stakeholder</i> yang memiliki kepentingan tinggi dalam Rempang Eco-City namun memiliki kekuasaan rendah.
	<i>Context Setters</i>	<i>Stakeholder</i> yang memiliki kekuasaan tinggi namun kepentingan rendah dalam pembangunan Rempang Eco-City.
	<i>Crowd</i>	<i>Crowd</i> memiliki kepentingan dan kekuasaan yang rendah dalam program Rempang Eco-City.
Analisis Peran <i>Stakeholders</i>	<i>Policy creator</i>	<i>Stakeholder</i> yang berperan dalam penentuan dan pengambilan keputusan Rempang Eco-City.
	<i>Coordinator</i>	<i>Stakeholder</i> yang berperan mengkoordinasikan berbagai pihak terkait dalam pembangunan Rempang Eco-City.
	<i>Facilitator</i>	<i>Stakeholder</i> yang memfasilitasi untuk menunjang keberlangsungan pembangunan Rempang Eco-City.
	<i>Implementer</i>	<i>Stakeholder</i> yang berperan melaksanakan kebijakan pembangunan Rempang Eco-City.
	<i>Accelerator</i>	<i>Stakeholder</i> yang berperan untuk

		mempercepat pelaksanaan program pembangunan Rempang Eco-City.
--	--	---

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

Dalam konteks program pembangunan Rempang Eco-City, pengidentifikasian stakeholders dapat dilakukan dengan menggunakan konsep *government*, bisnis, *community*, akademisi dan media. Sementara itu, pemetaan *stakeholders* akan dikaji dengan menggunakan fenomena berdasarkan *power* dan *interest*. Pemain (*players*) dalam pembangunan Rempang Eco-City meliputi aktor yang memiliki kepentingan tinggi dan kekuasaan signifikan untuk memengaruhi hasil pembangunan. Subjek (*subjects*) merupakan aktor yang sangat peduli dengan dampak pembangunan tetapi memiliki kekuasaan terbatas untuk memengaruhi keputusan secara langsung. Penentu konteks (*context setters*) mencakup entitas seperti aktor yang memiliki kekuasaan signifikan untuk membentuk opini publik dan lingkungan kebijakan, meskipun mereka mungkin tidak memiliki kepentingan pribadi yang kuat terhadap hasil spesifik program. Kerumunan (*the crowd*) terdiri dari individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dan kekuasaan rendah.

Konsep analisis peran *stakeholders* dalam program pembangunan Rempang Eco-City, akan dikaji menggunakan fenomena klasifikasi *stakeholders* ke dalam lima peran berbeda: *policy creator*, *coordinator*, *facilitator*, *implementer*, dan *accelerator*. Dalam konteks ini, *policy creator* merupakan aktor yang menetapkan kebijakan dan regulasi untuk program. *Coordinator* mungkin pihak yang mengkoordinasikan berbagai pihak terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. *Facilitator* aktor yang membantu memfasilitasi komunikasi

dan partisipasi masyarakat lokal. *Implementor* merupakan aktor yang secara langsung terlibat dalam pembangunan fisik program. Terakhir, *accelerator* merupakan aktor yang menyediakan sumber daya dan dana untuk mempercepat realisasi program.

1.7 Argumentasi Penelitian

Pulau Rempang, yang terletak di Kota Batam, Provinsi Riau, dikenal dengan potensi strategisnya karena berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Pemerintah Indonesia berupaya memanfaatkan potensi ini dengan mengembangkan Rempang Eco-City, sebuah program besar yang dikelola oleh PT Makmur Elok Graha (MEG). Program ini bertujuan untuk menciptakan kawasan industri, perdagangan, dan pariwisata yang terintegrasi, dengan harapan dapat meningkatkan kondisi ekonomi di wilayah tersebut. Namun, program Rempang Eco-City telah menimbulkan konflik agraria yang kompleks. Konflik ini terutama disebabkan oleh rencana relokasi 16 Kampung Tua, yang telah dihuni oleh masyarakat lokal selama lebih dari dua abad. Relokasi ini memicu penolakan dan protes dari masyarakat setempat. Masalah ini diperburuk oleh tumpang tindih regulasi mengenai status lahan dan kurangnya pengakuan atas hak-hak tanah masyarakat adat.

Permasalahan muncul karena pengelolaan dan regulasi lahan yang tidak jelas, serta kurangnya komunikasi dan partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan untuk menjalankan program Rempang Eco-City diambil tanpa persiapan matang dan tidak mempertimbangkan

kepentingan masyarakat yang terdampak langsung oleh program tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat lokal.

Tujuan penelitian ini merupakan untuk mengidentifikasi, melakukan pemetaan, dan menganalisis peran *stakeholder* dalam pembangunan Rempang Eco-City dalam pembangunan Rempang Eco-City. Melalui pemahaman peran *stakeholders*, penelitian ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih responsif dan inklusif, guna memastikan partisipasi yang tepat dan keterlibatan yang adil dari semua pihak yang terlibat dalam program ini.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dengan judul "Peran *Stakeholder* dalam Pembangunan Rempang Eco-City" merupakan penelitian kualitatif dengan data yang dihasilkan bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan melalui pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi (Kismartini, 2023). Tujuan penelitian ini merupakan untuk mengidentifikasi *stakeholders* yang terlibat dalam program pembangunan Rempang Eco-City, melakukan pemetaan terhadap peran *stakeholders*, serta menganalisis peran *stakeholders* dalam program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika interaksi antara pemerintah, perusahaan, masyarakat lokal, dan organisasi lainnya yang terlibat, sehingga dapat mengungkap peran strategis masing-masing pihak dalam pembangunan Rempang Eco-City.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat di mana masalah penelitian terjadi dan tempat peneliti memperoleh informasi dari objek yang diteliti (Kismartini, 2023). Situs penelitian utama dalam penelitian ini merupakan Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, khususnya daerah yang dilakukan pembangunan Rempang Eco-City. Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan lapangan yang mendalam, melibatkan observasi langsung dan interaksi dengan masyarakat lokal serta pihak terkait. Beberapa lokasi spesifik yang menjadi fokus penelitian mencakup wilayah yang terkena dampak langsung dari program, untuk memahami peran *stakeholders* yang terlibat dalam pembangunan Rempang Eco-City.

1.8.3. Fokus dan Fenomena Penelitian

Fokus penelitian mendefinisikan batasan dan inti masalah secara umum (Sugiyono, 2011 dalam Kismartini, 2023). Fokus penelitian ini meliputi identifikasi, pemetaan, dan analisis peran stakeholder dalam pembangunan Rempang Eco-City. Penentuan fokus ini berguna untuk menetapkan kriteria inklusi-eksklusi bagi informasi baru yang muncul (Kismartini, 2023). Fenomena dalam penelitian kualitatif bersifat menyeluruh dan saling berhubungan. Fokus dan fenomena dalam penelitian ini dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 5. Fokus dan Fenomena Penelitian

Fokus	Fenomena	Gejala
Identifikasi <i>Stakeholders</i>	<i>Government</i>	Pemerintah pusat dan daerah yang menetapkan kebijakan dan regulasi

		dalam pembangunan Rempang Eco-City.
	Bisnis	Perusahaan swasta terlibat dalam investasi dan konstruksi infrastruktur dalam pengembangan Rempang Eco-City.
	<i>Community</i>	Organisasi masyarakat sipil maupun LSM aktif yang mengadvokasi partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan Rempang Eco-City.
	Akademisi	Institusi yang berkontribusi pada penelitian dan inovasi dalam pembangunan Rempang Eco-City.
	Media	Platform media dan komunikasi sebagai sarana penyebaran informasi dalam pengembangan Rempang Eco-City.
Pemetaan <i>Stakeholders</i>	<i>Players</i>	<i>Stakeholder</i> yang memiliki kepentingan tinggi dan kekuasaan besar dalam pembangunan Rempang Eco-City.
	<i>Subjects</i>	<i>Stakeholder</i> yang memiliki kepentingan tinggi dalam Rempang Eco-City namun memiliki kekuasaan rendah.
	<i>Context Setters</i>	<i>Stakeholder</i> yang memiliki kekuasaan

		tinggi namun kepentingan rendah dalam pembangunan Rempang Eco-City.
	<i>Crowd</i>	<i>Crowd</i> memiliki kepentingan dan kekuasaan yang rendah dalam program Rempang Eco-City.
Analisis Peran <i>Stakeholders</i>	<i>Policy creator</i>	<i>Stakeholder</i> yang berperan dalam penentuan dan pengambilan keputusan Rempang Eco-City.
	<i>Coordinator</i>	<i>Stakeholder</i> yang berperan mengkoordinasikan berbagai pihak terkait dalam pembangunan Rempang Eco-City.
	<i>Facilitator</i>	<i>Stakeholder</i> yang memfasilitasi untuk menunjang keberlangsungan pembangunan Rempang Eco-City.
	<i>Implementer</i>	<i>Stakeholder</i> yang berperan melaksanakan kebijakan pembangunan Rempang Eco-City.
	<i>Accelerator</i>	<i>Stakeholder</i> yang berperan untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan Rempang Eco-City.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

1.8.4. Subjek Penelitian

Penelitian ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan Rempang Eco-City. Subjek penelitian dipilih berdasarkan pemahaman *stakeholder* terhadap fenomena yang diteliti, sehingga mampu memberikan data yang akurat dan realistis sesuai kondisi lapangan. Kriteria pemilihan subjek mencakup *stakeholder* yang berperan dalam program Rempang Eco-City, termasuk lembaga atau organisasi pemerintah, pihak swasta, masyarakat lokal, akademisi, dan media yang terlibat. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang mendalam dan komprehensif tentang peran *stakeholders* dalam program Rempang Eco-City.

1.8.5. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif untuk memahami peran *stakeholders* dalam pembangunan Rempang Eco-City. Data kualitatif ini mencakup wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, observasi lapangan langsung, serta analisis dokumen terkait program dan kebijakan yang berlaku. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali lebih dalam perspektif *stakeholder* serta menganalisis peran *stakeholder* dalam program Rempang Eco-City. Berikut jenis data kualitatif yang akan dilakukan dalam penelitian, yaitu:

1) Studi Kasus

Metode studi kasus dilakukan dengan mendalami pemahaman mengenai individu atau kelompok dalam kurun waktu tertentu untuk mendapatkan deskripsi data yang mendalam (Kismartini, 2023). Studi kasus ini melibatkan pendalaman mengenai pembangunan Rempang Eco-City di Pulau Rempang serta observasi terhadap pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana peran *stakeholder* yang terlibat dalam pembangunan Rempang Eco-City.

2) Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan menganalisis tulisan-tulisan yang relevan dengan topik penelitian (Kismartini, 2023). Peneliti melakukan studi dokumen menggunakan sumber dari dokumen maupun artikel yang relevan mengenai pembangunan Rempang Eco-City untuk mendapatkan data tentang peran *stakeholder* yang terlibat. Proses ini mencakup tinjauan terhadap laporan pemerintah, publikasi akademis, artikel media, dan dokumen kebijakan yang memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana berbagai aktor berkontribusi dan berinteraksi dalam pembangunan Rempang Eco-City.

1.8.6. Sumber Data

Penelitian ini menggabungkan data primer dan sekunder dengan menggunakan sumber data yang berasal dari narasumber atau informan serta data statistik dari literatur, sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pejabat pemerintah, masyarakat lokal yang secara langsung terdampak oleh program, serta aktivis dan organisasi yang fokus pada advokasi hak-hak tanah. Selain itu, media yang meliput perkembangan program dan isu-isu terkait juga termasuk dalam subjek penelitian. Observasi lapangan juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran langsung tentang pelaksanaan program.

2) Data Sekunder

Data sekunder mencakup laporan evaluasi program, dokumen kebijakan, literatur yang relevan, dan data statistik yang tersedia. Kombinasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran *stakeholder* dalam pembangunan Rempang Eco-City.

1.8.7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan aspek terpenting dan menjadi langkah strategis untuk memperoleh data dan informasi (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data meliputi:

1) Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung kondisi di lapangan terkait program Rempang Eco-City. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang aktivitas, interaksi, dan dinamika yang terjadi secara nyata. Melalui observasi, peneliti dapat mengidentifikasi praktik terbaik, tantangan, dan peluang yang mungkin tidak terungkap melalui metode lain.

2) Wawancara

Wawancara melibatkan percakapan langsung dengan subjek penelitian, seperti pejabat pemerintah, masyarakat lokal, aktivis, dan pihak swasta yang terlibat dalam program. Metode ini memungkinkan peneliti mendapatkan pandangan, pengalaman, dan persepsi langsung dari individu yang terlibat. Wawancara memberikan wawasan kualitatif yang mendalam dan memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih spesifik dan terperinci.

3) Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen resmi yang berkaitan dengan program, termasuk laporan evaluasi, kebijakan pemerintah, dan catatan pertemuan. Teknik ini membantu peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kerangka kerja, tujuan, dan pelaksanaan program. Analisis dokumen juga memungkinkan peneliti untuk mengkonfirmasi informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

4) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan melibatkan penelusuran literatur yang relevan, seperti jurnal akademik, buku, dan artikel yang membahas topik terkait dengan pembangunan Rempang Eco-City. Teknik ini menyediakan landasan teoritis dan konteks yang diperlukan untuk memahami fenomena yang diteliti. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat mengidentifikasi konsep, teori, dan temuan sebelumnya yang dapat memperkaya analisis dan interpretasi data.

1.8.8. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan metode pengelompokkan, pengurutan, dan meningkatkan data dengan tujuan untuk memudahkan pembaca (Kismartini, 2023). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan metode kualitatif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yaitu:

1) Reduksi Data

Langkah awal analisis merupakan reduksi data, di mana data mentah dari wawancara, observasi, dan dokumen disaring untuk mengidentifikasi informasi yang relevan. Data yang tidak relevan dihilangkan, sementara informasi penting dikodekan dan dikelompokkan berdasarkan tema atau konsep yang muncul.

2) Penyajian Data

Selanjutnya, data yang telah direduksi disusun secara sistematis untuk penyajian. Ini melibatkan penggunaan matriks, tabel, atau diagram yang membantu visualisasi dan memudahkan identifikasi pola dan hubungan antar tema. Penyajian data memungkinkan peneliti untuk melihat secara keseluruhan bagaimana data tersebut saling berhubungan dan mendukung temuan penelitian.

3) Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang telah disajikan kemudian dianalisis lebih mendalam untuk mengidentifikasi temuan utama dan pola yang signifikan. Triangulasi data dari berbagai sumber digunakan untuk memastikan keakuratan dan keandalan temuan. Kesimpulan

yang ditarik berfokus pada peran *stakeholder* dalam pembangunan Rempang Eco-City, dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi program.

1.8.9. Kualitas Data (*Goodness Criteria*)

Dalam penelitian kualitatif yang berkaitan dengan implementasi program pembangunan Rempang Eco-City, kualitas data (*goodness criteria*) memiliki peran sentral. Untuk memastikan kualitas data yang optimal, digunakan beberapa jenis triangulasi: triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1) Triangulasi Sumber

Langkah ini menggabungkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan (pejabat pemerintah, masyarakat lokal, aktivis, dan media), observasi lapangan, serta dokumen terkait. Pendekatan ini membantu memvalidasi informasi dengan membandingkan data dari berbagai perspektif, sehingga meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

2) Triangulasi Teknik

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan berbagai teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Menggunakan teknik yang beragam memungkinkan peneliti untuk mengatasi keterbatasan yang mungkin muncul jika hanya menggunakan satu metode, serta memastikan data yang dikumpulkan lebih komprehensif dan dapat dipercaya.

3) Triangulasi Waktu

Pengumpulan data dilakukan pada berbagai waktu untuk menangkap dinamika dan perubahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program pembangunan Rempang Eco-City. Dengan melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda, peneliti dapat mengidentifikasi perubahan dan konsistensi dalam temuan, serta memastikan bahwa hasil penelitian tidak terpengaruh oleh faktor temporal yang sementara.

Berdasarkan uraian, peneliti memastikan bahwa penelitian ini mencapai kredibilitas, otentisitas, konsistensi, keandalan, dan keterbukaan. Dengan menjaga kualitas data sesuai standar tersebut, penelitian ini akan mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam konteks akademis dan praktis, memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran *stakeholder* dalam pembangunan Rempang Eco-City.